



Naik 8,5 Persen, UMP DIJ Tetap Terendah

JOGJA, Jawa Pos - Keprihatinan tenaga kerja di DIJ berlanjut. Besaran upah minimum provinsi (UMP) 2020 diperkirakan masih yang terendah se-Indonesia. Padahal, usulan kenaikan mencapai 8,51 persen. Yakni, dari Rp 1.570.992,73 menjadi Rp 1.704.608,25. Kenaikan itu belum mampu mengangkat besaran UMP yang bersaing dengan provinsi lain.

Kenaikan UMP didasarkan pada inflasi dan angka pertumbuhan nasional mengacu Surat

Kementerian Ketenagakerjaan, ungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIJ Andung Prihadi Santoso sesuai bertemu Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Bangsa Kepatihan Kantor Gubernur DIJ kemarin (30/10).

Dari pertemuan itu, surat keputusan besaran UMP DIJ akan ditandatangani HB X paling lambat besok (1/11). Andung menerangkan, kenaikan upah 2020 mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

UMK KABUPATEN/ KOTA DAN UMP DIJ 2020



Sumber: Disakertrans Di



BAGUS/JWA POS

Pengupahan. Dari lima kabupaten/kota se-DIJ, wilayah dengan UMK 2020 terendah adalah

Gunungkidul sebesar Rp 1.705.000. Sementara itu, wilayah dengan UMK 2020 tertinggi adalah Kota

Jogja sebesar Rp 2.004.000. (selengkapnya lihat grafis)

Nanti, indikator penetapan upah di DIJ berdasar wawasan pengurangan kemiskinan. Pemprov akan mengajukan surat kepala daerah terkait konsolidasi UMP 2021 mendatang.

Saat disinggung mengenai UMP yang masih terendah di Indonesia, Andung enggan berkomentar terlalu banyak. Keputusan penetapan UMP tersebut didasarkan pada PP 78/2015. "Kenaikan yang dibuat PP ini

modelnya disengker sehingga di mana saja sama," terangnya.

Wali Kota Jogja Hariyadi Suyuti menyatakan, penetapan kenaikan upah telah ditetapkan pada rumusan tertentu. Besarnya kenaikan di setiap wilayah sama. "Angka itu sudah hasil rapat dewan pengupahan kota. Kota satu-satunya di atas dua (Rp 2 juta, Red)," tuturnya.

Seiring akan ditetapkannya UMP 2020, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ dijadwalkan

melakukan aksi pecah telur raksasa upah layak. Simbolis pecah telur raksasa sepanjang enam meter itu adalah salah satu bentuk sikap terhadap problematika perburuhan di DIJ.

Lima tahun terakhir, DPD KSPSI DIJ menilai UMP tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL). "Dengan telur dipecahkan ini sikap kami supaya tahun 2020 nanti upah layak bisa tercapai," ujar Sekretaris KSPSI DIJ Irsyad Ade Irawan di Gedung AJB Bumi-putera. (bhn/cr15/c13/sep)

anjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005